

## **Peran *Street Level Bureaucrats* Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur**

*The Role of Street Level Bureaucrats in the Implementation of the Family Hope Program in Sorowako, Nuha District, East Luwu Regency*

**Sarah Ayuni\*, Uddin B. Sore, Muhammad Ridha Suaib**

Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

\*email: sarahayuni028@gmail.com

Diterima: 15 Agustus 2024 / Disetujui: 30 Januari 2025

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran dan tantangan yang dihadapi oleh *Street Level Bureaucrats* dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Sorowako, sebuah daerah terpencil di Indonesia. PKH adalah salah satu program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan instrument pedoman wawancara, pedoman observasi dan Dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat dinas sosial yang terkait langsung dengan kegiatan pkh, petugas pendamping PKH, petugas verifikasi data desa, dan pihak Masyarakat penerima program pkh di sorowako di pilih dengan Teknik purposiv sesuai peran dan tanggungjawabnya. Hasil penelitian ini di temukan bahwa *Street Level Bureaucrats* memiliki peran yang penting dalam implementasi PKH di Desa Sorowako. Meskipun dihadapkan pada beberapa tantangan, peran mereka berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi program PKH. Masih diperlukan upaya untuk memperkuat peran SLB dan mengatasi tantangan yang dihadapi guna meningkatkan implementasi PKH di tingkat Pemerintah Desa Sorowako. Peran penting dalam implementasi PKH terkait tanggung jawab untuk mengidentifikasi keluarga miskin yang memenuhi kriteria program, menyusun daftar penerima manfaat, dan melaporkan data ke pihak berwenang, serta memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.

**Kata Kunci:** *Street Level Bureaucrats*, Implementasi Program, Keluarga Harapan

### **Abstract**

*This study aims to investigate the role and challenges faced by Street Level Bureaucrats in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sorowako, a remote area in Indonesia. PKH is one of the social empowerment programs that aims to reduce poverty and improve the welfare of poor families. This study uses qualitative descriptive research methods with data collection techniques using interview guideline instruments, observation guidelines and documentation. Research informants consisting of social service officials directly related to PKH activities, PKH assistance officers, village data verification officers, and PKH program recipient communities in Sorowako are selected with purposiv techniques according to their roles and responsibilities. The results of this study found that Street Level Bureaucrats have an important role in the implementation of PKH in Sorowako Village. Although faced with several challenges, their role has a significant impact on the effectiveness of PKH program implementation. Efforts are still needed to strengthen the role of SLB and overcome the challenges faced to improve PKH implementation at the Sorowako Village Government level. An important role in PKH implementation is related to the responsibility to identify poor families who meet the program criteria, compile a list of beneficiaries, and report data to the authorities, as well as ensure the distribution of aid is on target and well-coordinated.*

**Keywords:** *Street Level Bureaucrats*, Program Implementation, Family Hope



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Peran penting Street Level Bureaucrats dalam implementasi kebijakan tidak bisa diabaikan. Purwanto (2012:167) memaparkan bahwa pentingnya peran Street Level Bureaucrats terkait dengan fungsinya dalam menyampaikan berbagai program keluarga harapan secara langsung kepada kelompok sasaran. Para ahli menyebutkan bahwa street level bureaucrats are key players in any policy implementation proces. Front line bureaucrats atau sreet Level Bureaucrats dalam studi implementasi biasa juga disebut dengan birokrat garda depan. Mereka ini ada adalah SDM birokrasi yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan seperti: mendata kelompok sasaran yang eligible, melakukan sosialisasi, mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran, memastikan bahwa keluaran keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan PKH mengacu pada peraturan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang di dalamnya termuat prosedur pelaksanaan PKH. Namun, selama pelaksanaan di kecamatan Nuha di Desa Sorowako, ditemukan bahwa (1) Alokasi bantuan melalui Program Keluarga Harapan tidak adil karena banyak orang yang tidak mampu menurut kategori PKH tidak mendapatkan bantuan, (2) Mereka yang sekarang diakui sebagai peserta Program Keluarga Harapan yang dianggap mandiri dan kompeten akan terus menerima bantuan, (3) Masalah pengiriman uang bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak tepat waktu sering terjadi. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan seberapa besar optimalisasi yang benar-benar dicapai dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap pelaksana PKH di Desa Sorowako Kecamatan Nuha. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait capaian program berdasarkan kriteria penilaian, khususnya berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program PKH di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

Bantuan yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, program PKH mungkin dapat mencapai tujuan yang luar biasa: penghapusan kemiskinan secara menyeluruh. Terdapat sejumlah besar masyarakat kurang mampu di Desa Srowoako yang masih sangat bergantung pada program PKH. Meskipun beberapa strategi, peraturan, program, dan inisiatif telah diterapkan untuk memerangi kemiskinan, belum ada bukti konklusif tentang keberhasilan mereka (Luwutimurkab.2019).

Penelitian ini berupaya menganalisis kriteria yang digunakan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Studi ini juga akan menyelidiki faktor-faktor yang memperlambat peluncuran Program Keluarga Harapan di daerah tersebut. Bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) tersedia bagi keluarga miskin (KM).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan instrumen pedoman wawancara, pedoman observasi dan Dokumentasi. Responden penelitian dipilih dengan menggunakan Teknik purposive yang peneliti anggap cakap dan mengetahui data yang peneliti butuhkan karena sesuai keterlibatan fungsi dan tanggungjawabnya serta Masyarakat penerima program PKH. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data atau verifikasi data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prosedur Dalam Implementasi Keluarga Harapan Di Sorowako

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di seluruh negeri. Program ini memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang terdaftar dalam basis data PKH dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berikut ini adalah prosedur Implementasi Program Keluarga Harapan:

#### a) Prosedur Implementasi Bantuan PKH

Prosedur pelaksanaan yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan terhadap keluarga miskin, prosedur implementasi bantuan PKH peneliti telah temukan pada papan informasi yang ada di kantor Desa Sorowako.

#### b) Proses Seleksi Dan Kriteria Penerima Bantuan PKH

Seleksi yang dilakukan oleh Tim pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, peneliti telah menemukan di papan informasi proses seleksi dan kriteria bantuan PKH pada kantor desa Sorowako.

#### c) Proses Pendaftaran dan verifikasi data penerima bantuan PKH

Tidak terdapat proses pendaftaran pada prosedur Implementasi Bantuan PKH yang ada peneliti temukan hanya proses pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH.

Peneliti juga menemukan verifikasi data sudah terlaksana sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

#### d) Penentuan Jumlah Bantuan PKH

Penentuan bantuan, peneliti temukan sudah dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan Masyarakat, ditetapkan jumlah ini terlampir pada arsip pemerintah desa sorowako.

#### e) Mekanisme Penyaluran bantuan PKH

Mekanisme Penyaluran bantuan PKH, peneliti temukan melalui dua metode yaitu via transfer dibank Mandiri dan Kantor Pos. sudah benar dan jumlah bantuan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, nominal yang dikelurkan dapat kita lihat pada arsip Desa Sorowako.

#### f) Sistem pemantauan dan evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi penggunaan dana bantuan, peneliti menemukan bahwa Mereka melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memastikan bantuan yang diterima digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan dampak yang diharapkan. Peneliti juga menemukan bahwa SLB juga dapat memberikan pendampingan kepada penerima PKH dalam mengelola bantuan dan memanfaatkannya secara efektif.

#### g) Kolaborasi dengan instansi pemerintah dengan program PKH

Kolaborasi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan instansi pemerintah merupakan sebuah pendekatan yang penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PKH merupakan salah satu program pemberdayaan sosial yang telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama PKH adalah untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, Kesehatan.

#### h) Pihak yang berperan dalam upaya penyalahgunaan Implementasi PKH

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) atau program pemberdayaan sosial lainnya, terdapat beberapa pihak yang berpotensi berperan dalam upaya penyalahgunaan. Penyalahgunaan dapat merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan program, menyimpang dari tujuan asli program, atau menyalahgunakan dana atau sumber

daya yang seharusnya digunakan untuk membantu keluarga miskin. Beberapa pihak yang mungkin berperan dalam upaya penyalahgunaan implementasi PKH.

i) Proses pengaduan informasi Program PKH

Pengaduan informasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Melalui proses pengaduan informasi, peserta atau masyarakat umum dapat melaporkan masalah, keluhan, atau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan program PKH. Pengaduan informasi ini berperan sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi program agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan sosial dan pengentasan kemiskinan.

j) Dampak dengan adanya program PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Melalui bantuan tunai bersyarat dan pendampingan, program ini berupaya memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi.

## **2. Peran aktor utama dalam implementasi program keluarga harapan**

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sorowako, Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.

Pendampingan tersebut dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit satu kali setiap bulan dan memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH, terdapat beberapa aspek Peran Aktor Utama yang perlu dipertimbangkan. Peran aktor utama menurut Ahli sosiologi ini menyoroti peran pekerja lapangan atau pendamping dalam program-program bantuan sosial. Menurutnya, pendamping yang bekerja langsung dengan penerima manfaat memiliki peran penting dalam membantu mereka memahami dan mematuhi komitmen program (Michael Lipsky). Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan terkait dengan peran aktor utama dalam implementasi PKH di Desa Sorowako:

- a) Membantu pendataan dan pengelolaan dalam Proses Implementasi program PKH.
- b) Mengimplementasikan Kriteria dan pedoman dalam penentuan Calon Penerima Bantuan PKH.

## **D. KESIMPULAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur Program Keluarga Harapan Desa Sorowako bahwa Implementasi PKH di desa Sorowako tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang sebagaimana mestinya, dimana penentuan calon penerima bantuan PKH hanya berdasarkan data hasil tinjauan langsung yang diberikan pendamping PKH. Peran Aktor utama dalam implementasi muncul Ketika dalam penentuan bantuan PKH tidak melalui proses pendaftaran sehingga pihak pemerintah langsung menetapkan sebagai calon penerima bantuan dan hanya diperkuat oleh hasil pendataan dan kunjungan lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dkk. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dibas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7, 115-124.
- Alfitrah. 2021. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
- Asnita. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Journal of Public Administration Musi Raya, 3, 1-9.
- Daud & Marini. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Jurnal Humaniora. Vol 2, No 1.
- Erwan & Dah. (2015). Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Erwan Agus Purwanto. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gava Media
- Hasbi, dkk. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Luwu Timur. Equilibrium. Vol 8, No 1.
- Juliana, dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kota Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Administrasi Publik, IV, 72-82.
- Kendi, I, K. 2019. Kebijakan Publik. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari. Kiagus, & Jumroh. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Program Keluarga Harapan Di Kota Palembang). Ilmu administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 1, 1-12.
- Luwutimurkab. 2020. Jayadi Nas Serahkan Bantuan Beras Untuk Warga Program Keluarga Harapan.
- Nugroho. 2013. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Vol 1. No 5.
- Rohman & Novitawati. 2020. Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi. vol 8, No 2.
- Sofianto, A. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. Sosio Konsepsia. Vol 10, No 1.